



MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
KEPANITERAAN
JL. RAYA MUARA LABUH – PADANG ARO, KM. 12 AMPALU
Web : pa-muaralabuh.go.id
Email : pa.muaralabuh@pta-padang.go.id
SOLOK SELATAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN UANG SISA PANJAR

Kode Dokumen	:	SOP/AP/30
Tanggal Pembuatan	:	01-03-2018
Tanggal Revisi	:	31-12-2021
Tanggal Efektif	:	03-01-2022

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO. SALINAN : 0 0 3
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>	

Disahkan oleh :
Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh

Hari Luthin, S.H.I., M.A.



Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Muara Labuh
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seizin Pengadilan Agama Muara Labuh

	PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH Jl. Raya Muara Labuh- Padang Aro Km 12 , Ampalu, Kec. Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif	SOP/AP/30 01 Maret 2018 31 Desember 2021 03 Januari 2022

SOP PENGEMBALIAN SISA PANJAR

DASARHUKUM		KUALIFIKASIPELAKSANA
1.	Pasal 1948 KUH Perdata	1. Mengusai POLA BINDALMIN
2.	SEMA 04 Tahun 2008	2. Menguasai SIPP / SIADPA PLUS
3.	UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	3. Memahami system pembukuan keuangan perkara
4.	KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	4. Memahami mekanisme pengembalian dan pengelolaan sisa panjar biaya perkara
5.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	
6.	SK KMANO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar Pelayanan peradilan	
7.	Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1.	SOP Penyelesaian Perkara	Komputer,Jaringan internet,Aplikasi SIPP, Siadpa Plus, SKUM, Buku Jurnal dan Induk Keuangan Perkara
2.	SOP Transparansi dan Informasi Perkara	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1.	Jika Majelis Hakim tidak memberikan rincian biaya Perkara setelah putusan dibacakan,maka sisa panjar yang dibayarkan tidak diketahui	Entry data keuangan, SKUM, Pengisian Buku Jurnal dan Induk Keuangan Perkara, buku bantu pengembalian panjar biaya perkara
2.	Jika kasir tidak mengembalikan sisa panjar atau tidak menyertorkan kekas negara biaya titipan pihak ketiga Yang lebih dari 6 bulan,maka dapat diduga pelanggaran undang-undang dan dapat dipidanaan	

SOP PENGELOLAAN UANG SISA PANJAR